



Analisis SWOT untuk Strategi Implementasi Program Layanan Internet Kecamatan pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Kota Ternate

Nurlela Syarif¹✉

¹Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMMU, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia, e-mail : nellasyarif@gmail.com

Vol.	No.
1	1
Hal : 51 - 58	
Artikel Penelitian	

Info. Artikel:

Di terima : 12 Mei 2021

Di revisi : 20 Mei 2021

Di Publikasi : 21 Mei 2021

✉Koresponden Author :

Nurlela Syarif

e-mail :

nellasyarif@gmail.com

Univ. Muhammadiyah

Maluku Utara

Ternate-Indonesia



Copyright©

J-SSH-Juni 2021

Abstrak.

Tantangan dalam kesenjangan teknologi informasi komunikasi ini, perlahan mulai di tindaklanjuti oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi c.q Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) melalui program Kewajiban Pelayanan Universal – Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam rangka percepatan pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian dengan menggunakan analisis SWOT ini selain untuk mengetahui bagaimana strategi implementasi Program Layanan Internet Kecamatan pada pelaksanaan KPU/USO di Kota Ternate juga sebagai upaya mengidentifikasi apakah kesenjangan teknologi dan informasi berbasis internet cenderung mulai dapat diantisipasi di Kota Ternate.

Keyword : Strategi Implementasi, Program, Layanan Internet, Kecamatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Internet sebagai salah satu sarana penghubung antar jaringan komputer sehingga memungkinkan pengguna komputer yang satu dengan yang lain dapat berkomunikasi bahkan dalam skala global. Begitu pentingnya peranan teknologi informasi berbasis internet ini bagi mendukung jalannya pembangunan. Akan tetapi, hal ini juga bergantung pada sejauh mana masyarakat luas dapat memanfaatkan TIK ini untuk dapat memacu setiap kegiatannya sehari-hari. Dalam berbagai penelitian misalnya, dewasa ini teknologi informasi telah terbukti merupakan wahana inovasi yang dapat mendorong dan meningkatkan kinerja di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Berkaitan dengan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana strategi implementasi program layanan internet kecamatan yang merupakan salah satu cakupan dari program Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Zuhul "Sebagai suatu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung akan turut serta dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK. Harus diakui bahwa pada saat ini penguasaan teknologi informasi kita masih sangat terbatas dan tertinggal. Untuk mengatasi ketertinggalan ini, sasaran penting dewasa ini adalah meningkatkan sisi pemanfaatan TIK yang dapat memberikan nilai tambah dari setiap kegiatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan berproduksi, dan penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien". (Zuhul 2008, hal. 173)

Apa yang disampaikan oleh Prof, Dr. Zulha di atas, jika dikaitkan dalam konteks perkembangan teknologi informasi berbasis internet di Kota Ternate merupakan sebuah kajian yang menarik untuk diteliti. Kita ketahui bersama bahwa Kota Ternate secara geografis terletak di kawasan timur Indonesia, sebagai wilayah yang cukup mengalami kondisi kesenjangan teknologi dan informasi berbasis internet. Kota Ternate sendiri berkisar kurang dari satu dasawarsa perkembangan teknologi informasi berbasis internet ini mulai tersentuh di kalangan masyarakat, dan itupun belum secara merata dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Berkaitan dengan tantangan dalam kesenjangan TIK ini perlahan mulai di tindaklanjuti oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi c.q Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) melalui program Kewajiban Pelayanan Universal – *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam rangka percepatan pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi program yang dimaksud yaitu M-PLIK atau Mobil – Pusat Layanan Internet Kecamatan adalah program KPU/USO berupa penyediaan infrastruktur dan layanan internet yang bersifat bergerak (Mobil Internet) di Kecamatan seluruh Indonesia.

Data penetrasi internet dibandingkan dengan jumlah penduduk masih terbilang kecil. Jumlah pelanggan internet hingga akhir 2006 tercatat sekitar dua juta. Sedangkan jumlah pengguna sekitar enam juta. Jumlah pengguna berlipat karena banyak pemakaian warnet dan memiliki alamat surat elektronik atau email lebih dari satu. Jumlah warnet se-Indonesia baru 6.000 dengan bandwidth per wartel 128 Kbps, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sekitar 219 juta jiwa. (Zulha, 2008. Hal 174). Berdasarkan data tersebut, apakah sebagai sebuah kemajuan dimana program layanan internet kecamatan ini, dapat membantu penetrasi pengguna internet khususnya di tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia.

Dalam konteks provinsi Maluku Utara khususnya Kota Ternate, program layanan internet kecamatan secara kuantitatif mulai tersebar di 9 kabupaten dengan total 32 unit MPLIK (lihat tabel). Program M-PLIK sendiri diselenggarakan oleh PT Rahajasa Media Internet atau Radnet adalah salah satu penyelenggara jasa internet yang pertama beroperasi di Indonesia dan telah melayani pengguna internet sejak tahun 1995. Radnet sendiri telah menandatangani kontrak dengan BP3TI sebagai penyedia jasa MPLIK di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Bagaimana strategi implementasi program layanan Internet sebagai salah satu program pemerintah pusat melalui KEMNINFO dalam rangka percepatan, pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasana pos telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi sasaran penelitian yaitu Kota Ternate. Kota Ternate sebagai sasaran target penelitian karena merupakan salah satu wilayah pelosok timur Indonesia yang cenderung membutuhkan keberadaan layanan internet dibandingkan di bagian kota yang notabennya sudah mengalami peningkatan dalam hal kesenjangan TIK.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengetahui bagaimana strategi implementasi Program Layanan Internet Kecamatan pada pelaksanaan KPU/USO di Kota Ternate. Mengidentifikasi apakah kesenjangan teknologi dan informasi berbasis internet cenderung mulai dapat diantisipasi melalui Program Layanan Internet Kecamatan pada pelaksanaan KPU/USO di Kota Ternate. Menghasilkan rekomendasi strategi implementasi Penyediaan Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada pelaksanaan KPU/USO Telekomunikasi di Kota Ternate sebagai masukan dalam kebijakan penerapan. Sementara Manfaat Penelitian Adapun manfaat luaran dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional; dan Pengayaan bahan ajar bagi dosen dan juga dirasakan oleh mahasiswa

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan metode analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) untuk kemudian dijadikan dasar terhadap penyusunan rekomendasi strategi pelaksanaan kebijakan yang diterapkan sebagai tujuan dari penelitian ini. Dengan menggunakan analisis SWOT beberapa gambaran detail tentang

aspek-aspek eksternal seperti kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari program layanan internet kecamatan M-PLIK dan PLIK dapat disikapi lebih lanjut untuk disesuaikan dengan kondisi internal seperti kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari penerapan program ini kepada masyarakat.

Tahap pengumpulan data selain dari studi pustaka, pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui empat macam metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi kepada instansi berwenang atau kompeten dalam penyelenggaraan KPU/USO Telekomunikasi mencakup dua hal yaitu Matrik Faktor Strategis Eksternal dan Matrik Strategis Internal. Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor strategis eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (EFAS) : a. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman), b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). c. Hitung rating (kolom 3) untuk masing-masing (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (diberi rating +4, jika kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana pembobotannya dihitung, f. Jumlahkan skor pembobotan pada (kolom 4) untuk memperoleh total skor pembobotan bagi organisasi bersangkutan.

III. Hasil Yang Dicapai

3.1. Peluang dan Tantangan Program KPU/USO Kecamatan

Tabel 1. Nilai Timbangan Lingkungan Eksternal

No	INDIKATOR	RATING	BOBOT	SKOR
	Peluang			
1	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	3	0.088	0.264
2	Strategi kendali mutu terkait pengawasan dan Perencanaan	3	0.106	0.318
3	Peningkatan Kesenjangan Informasi	2.5	0.088	0.22
4	Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara berkomunikasi jarak jauh	2.88	0.085	0.2448
5	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi disertai program pemberdayaan masyarakat	2.5	0.119	0.2975
	Jumlah Peluang			1.3443
6	Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan Bantuan	2.38	0.081	0.19278
7	Beralih fungsi menjadi alat kerja pemerintahan desa	2.38	0.125	0.12975
8	Sosialisasi program diperuntukkan bagi masyarakat	2.38	0.108	0.25704
9	Keengganan penggunaan fasilitas KPU/USO karena faktor Penempatan dan jaringan satelit internetnya	1.88	0.118	0.22184
10	Pengelolaan di tingkat lokal	1.63	0.183	0.13529
	Jumlah ancaman			1.10445
	Total Peluang -Ancaman			1.584

Terwujudnya masyarakat berbasis teknologi informasi komunikasi adalah peluang terbesar dalam pelaksanaan kewajiban dalam KPU/USO berbasis program M-PLIK dan PLIK di Kota Ternate. Dengan diterapkannya program internet tingkat kecamatan sangat diyakini bahwa mulai terdapat kesadaran dimasyarakat akan penggunaan teknologi internet. Strategi kendali mutu terkait pengawasan dan perencanaan adalah indikator berikutnya sebagai peluang. Diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam pelaksanaan program KPU/USO Bidang Telekomunikasi dan Informatika (TI) di masa mendatang. Masalahnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini. Indikator peningkatan kesenjangan informasi

berada pada posisi berikutnya adalah salah satu peluang dari program KPU/USO. Berbagai implementasi program KPU/USO (Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation) dengan penyediaan layanan TI ke masyarakat. Antara lain PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan), M-PLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan) sebagai upaya pemerintah penanganan kesenjangan informasi di masyarakat sehingga diharapkan dapat menghasilkan manfaat dengan produktifitas yang efisien dan efektif di masyarakat pedesaan. Indikator selanjutnya sebagai peluang yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat dimana dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Program ini kedepan menjadi peluang terciptanya komunikasi yang baik antar desa baik yang disatukan dalam wilayah administrasi tertentu ataupun di wilayah administrasi yang berbeda, sehingga terjalin komunitas-komunitas antar desa yang dapat mengembangkan potensi masing-masing desa dan saling bekerjasama. Sementara itu indikator pembangunan infrastruktur telekomunikasi disertai program pemberdayaan masyarakat adalah, masyarakat desa kebanyakan masih jauh dari sentuhan teknologi ini, lebih-lebih masyarakat yang berada dalam sasaran program KPU/USO ini, sehingga perlu adanya kebijakan lain selain sekedar membangun fasilitas. Masyarakat desa perlu diberi penyuluhan khusus tentang internet, apa itu internet, bagaimana mengakses internet, apa benefit yang didapatkan dari internet, dan gambaran baik tentang internet. Ada banyak pendekatan yang bisa dikembangkan melalui program ini kepada masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui yang paling urgen adalah bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang ada. Mengingat TIK merupakan barang baru bagi masyarakat pedesaan dimana tingkat literasi TIK mereka juga masih sangat rendah, maka membangun infrastruktur saja belum cukup. Disini diperlukan kebijakan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan TIK masyarakat, dengan harapan mereka mampu mereka mampu mengoperasikan dan mengambil manfaat dari fasilitas yang ada. Indikator-indikator yang dianggap sebagai ancaman program KPU/USO yaitu (1) Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan program, (2) Beralih fungsi menjadi alat kerja pemerintahan desa, (3). Ketidaktahuan masyarakat atas adanya fasilitas yang diperuntukkan bagi mereka (masyarakat). Ketiga indikator tersebut diyakini menjadi ancaman serius bagi program KPU/USO, khususnya ketidaktahuan masyarakat atas adanya program KPU/USO. Program layanan internet kecamatan yang lebih dikenal dengan program PLIK dan MPLIK (KPU/USO) telah berlangsung sekitar 3 tahun untuk PLIK dan 1 tahun untuk M-PLIK, hingga saat ini ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Hasil pengamatan (observasi) penulis ke beberapa lokasi penerima program hampir seluruhnya tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Infrastruktur memang telah berhasil dibangun, namun pemanfaatannya masih amat sangat rendah. Sehingga bila dikembalikan ke tujuan dibangunnya infrastruktur yang demikian strategis, maka program ini menjadi salah satu program pemerintah yang belum terimplementasikan dengan baik. Indikator berikutnya Keengganan masyarakat untuk menggunakan fasilitas USO yang dikarenakan penempatan dan aksesjaringan satelit internetnya. Keterangan yang penulis terima dari masyarakat, bahwa ketika mereka datang ke lokasi PLIK & MPLIK masih minim informasi penggunaan fasilitas internet bahwa itu dapat digunakan oleh masyarakat. Bahkan yang cukup mengejutkan salah satu fasilitas USO M-PLIK yang seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat ternyata koneksi perangkat tidak bisa terhubung ke internet. Selain itu, komputer dan internet bagi sebagian besar masyarakat pedesaan masih merupakan barang langka, bahkan banyak diantara mereka yang belum mengetahui seperti apa itu komputer atau internet. Sebagian besar perangkat desa belum bisa mengoperasikan komputer dan internet karena memang belum diberikan pelatihan bagi mereka. Bahkan kebanyakan perangkat desa belum mengerti untuk apa internet tersebut dan harus digunakan untuk apa? Menurut keterangan mereka, ketika memasang perangkat internet pihak Telkom (pemasang) hanya bilang mau memasang atau menambah fasilitas yang telah ada begitu terpasang petugas langsung pulang tanpa penjelasan detil (pemasangan perangkat selesai dalam satu hari), bahkan tidak ada berita acara penyerahan barang (tambahan fasilitas internet). Indikator ancaman yang terakhir adalah pengelolaan di tingkat local, dalam implementasi KPU/USO tidak terjalin koordinasi diantara stakeholder yang menentukan keberhasilan program KPU/USO, yakni pemerintah, implementor dan sasaran atau penerima kebijakan. Bahkan koordinasi antara pelaksana pembangunan infrastruktur KPU/USO dengan pemerintah di daerah maupun dengan penerima kebijakan (sasaran) tidak terjalin. Pelaksana KPU/USO sekedar memenuhi kewajibannya memasang fasilitas, perkara mau dipergunakan atau tidak bukan masalah bagi pelaksana.

3.2. Kekuatan dan Kelemahan Program KPU/USO Layanan Internet Kecamatan

Tabel 2. Nilai Timbangan Lingkungan Internal

NO	INDIKATOR	RATING	BOBOT	SKOR
Kekuatan				
1	Mendorong Masyarakat Melek Informasi Melalui Jaringan Internet	2.875	0.132	0.3795
2	Terciptanya Komunikasi yang Baik	2.625	0.13	0.34125
3	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan	2.625	0.114	0.29925
4	Terbentuknya Transformasi Kondisi Sosial Masyarakat yang Akrab dengan ICT	2.5	0.098	0.245
Jumlah Kekuatan				1.5755
Kelemahan				
5	Kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah	2.5	0.088	0.22
6	Kondisi infrastruktur yang belum memadai	2.5	0.068	0.17
8	Komunikasi Program Kepada Masyarakat	2.5	0.054	0.0
9	Tingkat literasi dan kemampuan mengoperasikan TIK masyarakat masih sangat rendah	2.375	0.108	0.2565
10	Kelemahan Koordinasi stakeholder penentu keberhasilan program KPU/USO	2	0.103	0.206
Jumlah Kelemahan				0.9875
Total Kekuatan - Kelemahan				2.563

Kekuatan utama program PLIK/MPLIK merupakan salah satu program Kemenkominfo dalam rangka pusat layanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan seluruh Indonesia yaitu mendorong masyarakat melek informasi melalui jaringan internet. Sejalan dengan pertumbuhan perdesaan, industri telekomunikasi semakin pesat pertumbuhannya akan tetapi ketersediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi belum terjadi secara merata, sehingga masih banyak di wilayah perdesaan yang belum terfasilitasi oleh telekomunikasi. Program PLIK/MPLIK meskipun secara penetrasi belum merata di wilayah perdesaan di Kota Ternate akan tetapi member stimulant yang cukup signifikan terhadap pengetahuan masyarakat akan suatu layanan telekomunikasi berbasis internet. Kekuatan selanjutnya yaitu dapat terciptanya komunikasi yang baik atau kolaborasi dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan yaitu terciptanya komunikasi yang baik antar desa baik yang disatukan dalam wilayah administrasi tertentu ataupun di wilayah administrasi yang berbeda sehingga terjalin komunitas-komunitas antar desa yang dapat mengembangkan potensi masing-masing desa dan saling bekerjasama. Pertukaran informasi ini diharapkan menjadi kekuatan tersendiri dari program KPU/USO dalam menciptakan masyarakat yang efektif dan efisien, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan masyarakat sehari-hari yang dapat meningkatkan taraf hidup yang didapat dengan cara komunikasi jarak jauh atau virtual tanpa memperhitungkan jarak dan waktu seperti e-education, e-bussiness, e-health, dll melalui akses layanan ICT yang telah tersedia.

Adapun yang menjadi kelemahan dari program KPU/USO adalah Kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah Keberhasilan program KPU/USO mencapai sasaran bukan ditentukan atau dilihat dari ketersediaan atau terbangunnya infrastruktur telekomunikasi di daerah sasaran. Namun ditentukan apakah fasilitas yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat (sasaran) setempat atau tidak. Program KPU/USO menjadi tidak ada artinya, apabila fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu strategi implementasi agar infrastruktur

telekomunikasi dan informatika yang ada di pedesaan bisa dimanfaatkan secara optimal, hal ini dalam pengamatan penulis perlu melibatkan seluruh stakeholders guna melakukan pelayanan, pengawasan atas keberlangsungan program. Selain itu, Kondisi infrastruktur yang belum memadai juga sebagai kelemahan dari program KPU/USO dimana dukungan infrastruktur berupa jalan, listrik (PLN), akses internet yang memadai dll ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Dalam implementasinya di Kota Ternate kondisi infrastuktur cenderung lemah sehingga pemanfaatan terhadap program ini dinilai tidak efektif. Indikator kelemahan berikutnya komunikasi program kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi kunci suksesnya sebuah program yang diluncurkan guna memperoleh partisipasi masyarakat yang lebih baik. Sejak diterapkannya program KPU/USO di Kota Ternate khususnya program PLIK/MPLIK kami melihat bentuk sosialisasi yang dilakukan cenderung lemah. Implementator cenderung tidak melakukan komunikasi secara strategis di masyarakat, padahal sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Sevice Obligation(USO) yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya di daerah ini dapat lebih berhasil dan semakin mendekatkan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. Indikator selanjutnya yaitu Tingkat literasi dan kemampuan mengoperasikan peralatan TIK masyarakat pedesaan masih sangat kurang (rendah). Masyarakat penerima fasilitas KPU/USO yang penulis sempat datangi di beberapa lokasi bahwa waktu mereka kebanyakan dihabiskan untuk mencari nafkah itulah tidak ada waktu lagi buat belajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kalaupun mereka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi adalah hand phone (telpon celluler) yang sudah cukup banyak dimiliki masyarakat desa. Namun demikian penggunaan PLIK/MPLIK lebih banyak digunakan oleh siswa-siswi dimana sebagian besar pemanfaatannya juga dinilai tidak efektif karena hanya berbasis pada situs social networking (Facebook) bukan pada penggunaan yang lebih strategis. Indikator yang terakhir adalah Tidak terjalin koordinasi diantara stakeholder yang menentukan keberhasilan program KPU/USO, yakni pemerintah, implementor dan sasaran atau penerima kebijakan, Dalam implementasi KPU/USO tidak terjalin koordinasi diantara stakeholder yang menentukan keberhasilan program USO, yakni pemerintah, implementor dan sasaran atau penerima kebijakan. Bahkan koordinasi antara pelaksana pembangunan infrastruktur USO dengan pemerintah di daerah maupun dengan penerima kebijakan (sasaran) tidak terjalin. Pelaksana KPU/USO sekedar memenuhi kewajibannya memasang fasilitas, perkara mau dipergunakan atau tidak bukan masalah bagi pelaksana.

3.3. Posisi strategis Program KPU/USO (PLIK-MPLIK) di Kota Ternate

Tabel 3. Matrik Internal-Eksternal

IFAS	<p><u>STRENGTHS (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Masyarakat melakukan Informasi Melalui Jaringan Internet • Terciptanya Komunikasi yang Baik • Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan • Terbentuknya Transformasi • Kondisi Sosial Masyarakat yang Akrab dengan ICT 	<p><u>(WEAKNESSES)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah • Kondisi infrastruktur yang belum memadai • Komunikasi Program Kepada Masyarakat Tingkat literasi dan kemampuan mengoperasikan TIK masyarakat masih sangat rendah • Kelemahan Koordinasi stakeholder penentu keberhasilan program KPU/USO
EFAS	<p><u>OPPORTUNITIES (OP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya masyarakat berbasis TIK • Strategi kendali mutu terkait pengawasan dan perencanaan • Peningkatan Kesenjangan Informasi • Meningkatkan taraf hidup 	<p><u>STRATEGI SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan berbasis pada pengendalian mutu program • Memperkuat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat • Membuka dengan luas jaringan koneksi internet supaya lebih
		<p><u>STRATEGI WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat strategi komunikasi / sosialisasi di masyarakat tentang manfaat penting internet • Melibatkan tokoh masyarakat dan infastruktur pedesaan • Peningkatan koordinasi semua lini

masyarakat dengan cara berkomunikasi jarak jauh	optimal	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi disertai program pemberdayaan masyarakat 		
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WO
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan bantuan • Beralih fungsi menjadi alat kerjapemerintahan desa • Sosialisasi program diperuntukkan bagi masyarakat • Keengganan penggunaan fasilitas KPU/USO karena faktor penempatan dan jaringan satelit internetnya • Pengelolaan di tingkat lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan sumber daya local • Manajemen pengelolaan • Pemetaan lokasi penerima bantuan secara strategis • Sosialisasi manfaat internet bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Merangkul organisasi/elemen masyarakat untuk pemantauan program Partisipasi masyarakat • perlu ditingkatkan dalam konteks kebersamaan • Membuat variasi program guna menarik minat masyarakat

IV. PENUTUP

1. Penyelenggaraan program KPU/USO Telekomunikasi diantaranya PLIK dan M-PLIK cukup berperan dalam menjembatani kesenjangan ‘digital divide’ dengan cara memfasilitasi universal access (fasilitas TIK digunakan secara bersama-sama di satu tempat) khususnya di Kecamatan dalam bentuk penyediaan layanan akses internet untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Akan tetapi, dalam implementasinya di kota Ternate dapat dikatakan bahwa program pemerintah mengurangi kesenjangan digital melalui program KPU/USO belum berjalan optimal. Karena tujuan dibangunnya fasilitas internet di daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan adalah untuk membuka akses informasi masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadi penghubung antara desa dengan desa, antara desa dengan kota dan sebaliknya, serta mendorong peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat, hal ini belum terlaksana dengan baik.
2. Keberhasilan program KPU/USO mencapai sasaran bukan ditentukan atau dilihat dari ketersediaan atau terbangunnya infrastruktur telekomunikasi di daerah sasaran. Namun ditentukan apakah fasilitas yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat (sasaran) setempat atau tidak. Program KPU/USO menjadi tidak ada artinya, apabila fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu strategi implementasi agar infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang ada di pedesaan bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat desa kebanyakan masih jauh dari sentuhan teknologi ini, lebih-lebih masyarakat yang berada dalam sasaran program KPU/USO ini, sehingga perlu adanya kebijakan lain selain sekedar membangun fasilitas. Masyarakat desa perlu diberi penyuluhan khusus tentang internet, apa itu internet, bagaimana mengakses internet, apa benefit yang didapatkan dari internet, dan gambaran baik tentang internet.
3. Terdapat banyak pendekatan yang bisa dikembangkan dalam implementasi program KPU/USO. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui yang paling urgen adalah bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang ada. Mengingat TIK merupakan barang baru bagi masyarakat perdesaan dimana tingkat literasi TIK mereka juga masih sangat rendah, maka strategi kendali mutu terkait pengawasan dan perencanaan diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan dan kepentingan dalam pelaksanaan program KPU/USO Bidang Telekomunikasi dan Informatika (TI) di masa mendatang.
4. Selain itu, Strategi yang menjadi prioritas dalam implementasi program KPU/USO yaitu PLIK dan M-PLIK berdasarkan pendekatan SWOT dan Matriks Internal-Eksternal (IE Matriks) adalah antarlain BP3TI melalui pihak ketiga perlu segera merealisasikan koneksi internet yang lebih baik lagi kepada masyarakat sehingga manfaat internet benar-benar terasa; lebih bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ; lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan secara berkala dan berkesinambungan, dan sosialisasi rutin kepada masyarakat kecamatan. Sedangkan penyelenggara program PLIK atau M-PLIK agar menekankan metode pemeliharaan dan penerapan

target penyelesaian gangguan sesuai dengan kondisi geografis; selektif dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat yang akan dijadikan sebagai pengelola PLIK; dan dapat memenuhi kebutuhan daya listrik perangkat yang akan ditempatkan pada lokasi PLIK atau MPLIK.

DAFTAR PUSTAKA

Denis McQuail (1987) Teori Komunikasi Massa : Suatu Pengantar Edisi Kedua. Jakarta. Erlangga.

Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si, (2010) Analisis Jalur Terhadap Tingkat Melek Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Literacy) Pada Mahasiswa FIP UNY.

<http://www.bisnis.com/articles/pemerintah-siap-rampungkan-program-internet-masuk-desa> Rabu, 07 Februari 2020 pukul 09.19.

<http://www.inilah.com/read/detail/118266/2010-internet-masuk-desa-tuntas/> Rabu, 07, Februari 2020 pukul 09.15.

<http://www.kotainternet.com/tag/internet-kampung> Sabtu, Januari 2020 pukul 10.45.

<http://kominfo.go.id/liputan/detail/2558/Enam+Kecamatan+Dapat+Mobil+Internet> Rabu, 10 Januari, 2020 pukul 09.29.

Kadek Dwi Cahaya Putra, (2008) Strategi Public relations Pariwisata Bali, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2008, Hal. 50.

Melwin Syafrizal. (2005) "*Pengantar Jaringan Komputer*", Yogyakarta: Penerbit Andi, Hal 16-17.

Pudji Muljono, (2005) "*Pemanfaatan Internet Sebagai Media Komunikasi Di Indonesia*. Bogor :Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA,) hal. 5.

Randy Reddick & Elliot King (1996) Internet Untuk Wartawan : Internet Untuk Semua Orang, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Rangkuti, F. (1997) Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Roger Fidler (2003) Mediamorfosis. Yogyakarta : Bentang Budaya.

Warner J. Severin & James W. Tankard, Jr (2007) Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Zulha (2008) Kekuatan Daya Saing Indonesia : Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan. Jakarta. Kompas.